

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan jurnal

- Linda Jane. 1991. *Reporting of Governmental Performance Indicators For Assessment of Public Accountability*. Desertasi Publik Admistrasi, Arizona State University.
- Griffin, Charles C. 2010. *Lives in the Balance : Improving Accountability for Public Spending in Developing Countries*. Whashington DC: Broking Intitutions Press.
- OTT, Katrina. 2006. *Making Public Finance Public: Subnational Budget Wacth in Croatia, Macedonia, and Ukraine*. Hungary: Local Government and Public Service Reform Initiative.
- Davey, Kenneth. 2009. *Making Government Accountable: Local Government Audit in Postommunist Europa*. Hungary: Local Government and Public Service Reform Initiative.
- Jordan, Lisa and Peter Van. 2006. *NGO Accountability: Politic, Principles and Innovation*. London : Earth Scan.
- Puspasari, Eka. 2015. *Efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo*. thesis, Fakultas Ilmu Sosial.
- Sutedjo. 2009. *Presepsi Stake Holders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah: Studi Kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Moloeng, J Laxy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nasution. 2003. *Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Sutrisno, Hadi. 1993. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.
- Paulus setiawan. 2003. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Program Pascasarjana Universitas Jenderal Sudirman.
- Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis Universitas Diponegoro. Semarang,
- BPKP, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Wulandari, Suci. 2008. *Presepsi Atas Akuntabiilitas Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta*: Jurnal Studi Akutansi Indonesia. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Ni Kadek Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintah Desa: Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem*. e-Jurnal Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol 1. No: 3 Tahun 2015).

Ambar Teguh Sulistiyani. 2003. *Manajemen dan Sumber Daya Manusia : Konsep Teori dan Pengembangan Dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

LAN, RI. 2003. *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Puji Agus, dan Madya widyaiswara. 2015: *JUKLAK BIMKON Pengelolaan keuangan Desa*

Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa. didalam <http://bppk.kemenkeu.go.id/> diakses 20/10/2016 Pukul 23:32.

Anwar Khoirul. 2012. *Urgensi dan Akuntabilitas Pendidikan*. Artikel dilihat dalam <https://khanwar.wordpress.com> diakses 18/10/2016 pukul 16:00.

Aditya Septiani, 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Padar Modal Yang Sedang Berkembang : Perspektif Teori Pengungkapan*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

Dr. Suranto. M.Pol, dkk. 2015. *Model Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Desa*. Usul Penelitian Hibah Bersaing Perguruan Tinggi. Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhamdyah Yogyakarta.

Peraturan perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Pasal 23, Pasal 72, Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Intruksi Presiden, RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

WEBSITE RESMI

<https://www.bantulkab.go.id> (dilihat 04/11/2016 Pukul 17:44).

<https://bantulkab.bps.go.id> (dilihat tanggal 04/11/2016 Pukul 18:59)

kec-dlingo.bantulkab.go.id (dilihat 15/11/2016 Pukul 15:20)

terong.bantulkab.go.id (dilihat 15/11/2016 Pukul 17:00)

temuwuh.bantulkab.go.id (dilihat 15/11/2016 Pukul 19:00)

<http://bppk.kemenkeu.go.id> (dilihat 20/10/2016 Pukul 23:32)